



---

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayatnya sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Ini disusun dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Terima kasih yang tak terhingga atas saran dan masukan yang bermanfaat dari kita semua sehingga tersusun RENJA yang sesuai dengan harapan dan cita-cita Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mewujudkan ketangguhan untuk menghadapi bencana kebakaran dan bencana lainnya di kabupaten Lima Puluh Kota.



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### DAFTAR TABEL

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II HASIL EVALUASI ERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra perangkat Daerah .	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan .....	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal .....	45
2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat .....	61

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	65
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	66
3.3 Program dan Kegiatan .....	67

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V PENUTUP



---

## DAFTAR TABEL

2.1 Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah 2021-2026.....	14
2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	44
2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024.....	57
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	58
4.1 Rencana Target Kinerja dan IKU Perangkat Daerah.....	66
4.2 Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	67



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintah Perencanaan menduduki peranan yang sangat penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu daerah. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen organisasi dan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pemerintahan pusat dan daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintahan daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan. Pada tingkatan perangkat daerah (PD), Implementasi kebijakan tersebut adalah rencana kerja perangkat daerah (Renja-PD).

Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disebut rencana kerja satuan perangkat daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode satu tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, renja dinas pemadam kebakaran mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pemabangunan tahun pemerintah daerah dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen perencanaan PD untuk satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja PD. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKAR) Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai



dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKAR) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKAR) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 yang telah ditetapkan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus dapat mendukung pencapaian target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk pada tahun 2017 dan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemadam kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota juga merupakan Perangkat Daerah (PD) yang sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di daerah.

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 secara khusus membahas konsep rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga akan berfungsi sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan memadu serasikan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pembangunan baik yang berskala nasional maupun berskala daerah.

Pada tahun 2025 fokus dan prioritas pembangunan Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran masuk dalam fokus peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana wilayah dengan prioritas pembangunan meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, oleh karenanya dalam Rencana Kerja Dinas Pemadam



Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 lebih menitik beratkan pada Kebakaran yaitu penanganan, pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum terjadinya kebakaran seperti pendidikan dan pelatihan anggota pemadam kebakaran, simulasi penanganan kebakaran, gladi dan simulasi penanggulangan Kebakaran.

Proses rancangan awal Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi tahap persiapan rancangan awal Renja, Rancangan awal Renja, Pelaksanaan Forum PD/Forum Gabungan PD dan Penetapan Renja.

Rancangan awal Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025. Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA PD.

Sesuai dengan Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang disesuaikan dengan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu: “Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat, dan Berbudaya, Dalam Kerangka Adat Basandi syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Dalam Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana Lainnya”, dengan misi sebagai berikut:

Meningkatkan peran dan fungsi Dinas dalam melaksanakan tugas pada pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran atau bencana lainnya.

1. Meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan internal maupun eksternal dalam melaksanakan tugas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran atau bencana lainnya.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan hunian dan hutan dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana unit kerja agar tetap dalam kondisi siaga.
4. Meningkatkan kondisi keselamatan kerja di sektor publik dan industri.

Dalam upaya mencapai urusan Dinas tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga mengacu pada 5 Pengabdian (Panca Darma) pemadam kebakaran yaitu:

Panca Darma Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
2. Pemadaman Kebakaran



3. Penyelamatan Korban
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Penanganan Bahan Bahaya Beracun

Untuk pembagian pelaksanaan tugas dan fungsi serta optimalisasi Pemadaman yang pelaksanaannya 24 jam dan untuk melaksanakan tugas dari siang dan malam memadamkan kebakaran, dengan moto “**Pantang Pulang Sebelum Api Padam**” walaupun nyawa taruhannya.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2014 nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor: Tahun 2015 tentang Perubahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Pakaian Aparatur Pemadam Kebakaran telah di ubah dengan Permendagri nomor 13 tahun 2019.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Teknis Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/permen/1980 tentang Syarat- syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017 tentang tatacara Perencanaan, Pengendalian serta Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186/kepmen/ 1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/314/BUP-LK/XI/2023 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat



Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024  
Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

23. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Permendagri nomor 77 tahun 2020 sebagai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang prioritas pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kongkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di amanatkan pada Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut hasil/keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada tahun Anggaran 2025.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja di atas tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan sistematika sebagai berikut :



- 
- BAB I : PENDAHULUAN**  
Berisikan Latar Belakang, Landasan hukum, Maksud dan tujuan Sistematika Penulisan
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**  
Berisikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III : TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**  
Berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
Berisikan Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V : PENUTUP**  
Berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2023 anggaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp. 7.655.254.247 dengan Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.233.622.071, Belanja Modal dan Jasa sebesar Rp. 3.742.314.992, dan Belanja Modal sebesar Rp. 679.317.184 dengan Realisasi keseluruhan sebesar 99.34%. Target PAD dari sektor yang terkait dengan kebakaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan realisasi adalah sebesar Rp. 17.295.000,- dengan presentase 34,59% yang baru bisa kita realisasikan. Kendala yang dihadapi Tahun sebelumnya sehingga tidak tercapainya target yang ditentukan adalah sebagai berikut :

- Waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak mendukung
- Jumlah personil yang belum memadai
- Sarana dan prasana yang tidak mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi tidak tercapainya target adalah:

- Meningkatkan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan
- Memperbanyak melakukan sosialisasi dan edukasi di masyarakat
- Menambah jumlah personil

##### 2.1.1 BELANJA

Pada tahun 2023 alokasi anggaran belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebesar Rp. 7.655.254.247,-. Dalam Tahun 2023 realisasi keuangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Rp. 7.605.019.551, Jumlah presentase keuangan adalah 99,34% dari anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi fisik mencapai 100% dari anggaran yang tersedia ada tiga komponen belanja yaitu :

- Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. **3.233.622.071**
- Belanja Barang Dan Jasa yang direncanakan yaitu sebesar Rp. **3.742.314.992**
- Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. **679.317.184**



Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2021 – 2026  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
(Form TC-29 Permendagri 86 Tahun 2017)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemadam kebakaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)			
					Tahun 2023	Tahun 2023			10=(7+9)	11=(10/4)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
1													
1	05												
1	05	01			100%	100%	100%	100%	100%	100			
1	05	01	2		100%	100%	100%	100%	100%	100			
1	05	01	2	01	Periode administrasi keuangan dan barang serta pembayaran gaji pegawai damkar	69 Orang	14 bulan	40 Orang	40 Orang	100	40 Orang	40 Orang	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023				
					Tahun 2023	Tahun 2023					2024	(tahun 2024)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)				
1	05	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ihtkisari realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	12 bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
1	05	01	2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	12 bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1	05	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah Kegiat Adminstrasi Umum Perngkat Daerah								
1	05	01	2,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	output: Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Laporan	12 bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
1	05	01	2,1	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	output: Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	40 Paket	12 bulan	43 Paket	43 Paket	100	35 Paket	35 Paket	100
1	05	01	2,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	output: Terlaksananya urusan kebersihan kantor	12 Paket	12 bulan	13 Paket	13 Paket	100	14 Paket	14 Paket	100
1	05	01	2,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	output: Terlaksananya Kebutuhan aLat Tulis Kantor	40 Paket	12 bulan	40 Paket	40 Paket	100	50 Paket	50 Paket	100
1	05	01	2,1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	output: Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan								100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023	
					Tahun 2023	Tahun 2023					2024
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)	
			12 Paket	12 bulan	10 Paket	10 Paket	100	9 Paket	9 Paket		
1	05 01 2,1 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	output:Tesedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	12 bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1	05 01 2,1 07	Penyediaan Bahan Material	output:Terlaksananya Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
1	05 01 2,1 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	output:Terpenuhinya makanan dan minuman	1 Laporan	1600 Porsi	1 Laporan	1 Laporan	71.42	1 Laporan	1 Laporan	90
1	05 01 2,1 09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	output:Tersedianya Konsultasi dan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Laporan	120 Kali	1 Laporan	1 Laporan	66.66	1 Laporan	1 Laporan	96
1	05 01 2,1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah								
1	05 01 2,1 06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	output:Terlaksananya Pengadaan Peralatan gedung kantor	14 Unit	8 unit	15 Unit	15Unit	50	13 Unit	13 Unit	30.76



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
					Tahun 2023	Tahun 2023								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)				
1	05	01	2,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	output:Tersedianya Peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
1	05	01	2,1		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	05	01	2,1	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya kebutuhan kelengkapan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	12 bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
1	05	01	2,1	02	Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	output:Terlaksananya pembayaran telepon, air dan rekening	1 Laporan	12 bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
1	05	01	2,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	output:Terkelolanya adminstrasi keuangan dan barang dinas pemadam kebakaran, pemberian gaji pegawai	1 Laporan	12 bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
1	05	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023				
					Tahun 2023	Tahun 2023					2024	(tahun 2024)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)				
1	05	01	2,1	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan	outputPemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional	12 Unit	12 bulan	12 Unit	12 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100
1	05	01	2,1	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	outputTerlaksananya Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	10 Unit	12 bulan	7 Unit	7 Unit	100	6 Unit	6 Unit	100
1	05	01	2,1	09	Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	outputTerlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
1	05	04			<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Persentase Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	100%	100%	100%	100%	98.64%	100%	100%	100
1	05	04	2		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dn Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1  2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
					Tahun 2023	Tahun 2023								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)				
1	05	01	2	01	pengecahan Kebakaran dalam daerah dan Kabupaten/Kota	Tersusunya norma , standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	1 Dokumen	36%	1 Dokumen	1 Dokumen	83.33	1 Dokumen	1 Dokumen	75
1	05	01	2	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase periode pemenuhan capaian personil pemadam dalam tanggap response time dalam pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya	1 Laporan	36%	1 Laporan	1 Laporan	95	1 Laporan	1 Laporan	90
1	05	01	2	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase capaian Kesiapsiagaan personil dalam penanganan pencegahan dan penyelamatan dalam kejadian	1 Dokumen	55%	1 Dokumen	1 Dokumen	85.71	1 Dokumen	1 Dokumen	94.11
1	05	01	2	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	Tertanggulangnya penanganan bahan berbahaya bercun kebakaran kabupaten/kota	1 Dokumen	36%	1 Dokumen	1 Dokumen	92.85	1 Dokumen	1 Dokumen	81.60
1	05	01	2	05	Standarisasi sarana dan Prasarana Pencegahan, penanggulangan Kebakatan dan alat pelindung diri	Persentase dalam pemeliharaan dan perbaikan dalam penilaian sarana dan prasarana	1 Dokumen	30%	1 Dokumen	1 Dokumen	83.3	1 Dokumen	1 Dokumen	92
1	05	01	2	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	1 Unit	41%	1 Unit	1 Unit	85.36	1 Unit	1 Unit	66.21



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023
					Tahun 2023	Tahun 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1 05 01 2 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur/ personil personil pemadam yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan kebakaran yang bersertifikasi	500 Orang	31org	200 Orang	200 Orang	66.66	100 Orang	100 Orang	50
1 05 01 2	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran								
1 05 01 2 01	Pendataan sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana proteksi kebakaran	1 Dokumen	9 kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	61.53	1 Dokumen	1 Dokumen	80
1 05 01 2 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah gedung atau fasilitas lainnya yang memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran yang aktif dan layak	1 Dokumen	20 lokasi	1 Dokumen	1 Dokumen	45 lokasi	1 Dokumen	1 Dokumen	58%
1 05 01 2	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran								
1 05 01 2 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Persentase periode personil dalam upaya melakukan investigasi kebakaran	1 Dokumen	50%	1 Dokumen	1 Dokumen	76	1 Dokumen	1 Dokumen	96.59
1 05 01 2	<b>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</b>	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1  2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
					Tahun 2023	Tahun 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.01	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase simulasi dan sosialisasi penanggulangan pencegahan bahaya kebakaran	500 Orang	36%	1000 Orang	1000 Orang	83.33	300 Orang	300 Orang	93.75
1.05.01.2.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah barisan relawan yang telah terampil dalam pemberdayaan pencegahan dan pengendalian kebakaran serta sosialisasi ditengah masyarakat	13 Desa/Kelurahan	240 org	13 Desa/Kelurahan	13 Desa/Kelurahan	75	13 Desa/Kelurahan	13 Desa/Kelurahan	76.92
1.05.01.2.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	persentase tersedianya sarana dan prasarana dalam pembedayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran	1 Dokumen	30%	1 Dokumen	1 Dokumen	83.33	1 Dokumen	1 Dokumen	90.90
1.05.01.2,1	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pncarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Mebahayakan Manusia								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023
					Tahun 2023	Tahun 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.1.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase tertanggulangnya penanganan bahaya bercun kebakaran kabupaten dan pencarian pertolongan manusia	1 Laporan	41%	1 Laporan	1 Laporan	85.36	1 Laporan	1 Laporan	94.11
1.05.01.2.1.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase aparaturnya/personil pemadam kebakaran yang profesional dalam pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	1 Laporan	36%	1 Laporan	1 Laporan	83.33	1 Laporan	1 Laporan	76.92



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point C Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama. Maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, serta norma dan standar pelayanan yang tepat.

Pada dasarnya Program dan Kegiatan yang ada pada tahun anggaran 2023 telah dapat terlaksana dengan **BAIK**. Hal ini dapat dilihat dari capai-capaian yang kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1** : Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya.

Indikator dari Sasaran Strategis “Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran” yaitu Persentase peningkatan sarana dan prasarana operasional pencegahan dan pengendalian kebakaran yang sesuai kebutuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan Persentase capaian tingkatan waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah layanan WMK dapat dilihat dari jumlah korban jiwa saat terjadinya Bencana Kebakaran.

Pada tahun 2023 memang cukup banyak kejadian kebakaran yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu jumlah Kebakaran rumah, bangunan atau lainnya yang sangat berhubungan dengan korban atau jiwa manusia berjumlah 96 kali kejadian Kebakaran. Dari jumlah kejadian kebakaran tersebut tertanggulangi dengan baik



dan tidak terdapat korban jiwa, kecuali kerugian material yang tidak dapat dihindari. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor teknis antara lain :

- Lambatnya laporan yang diterima oleh petugas
- Lokasi atau jarak dari lokasi bencana kebakaran dengan pos terdekat
- Sarana dan prasarana jalannya ditempuh
- Jauhnya sumber air dari lokasi kejadian
- Terkendalanya penanggulangan bencana kebakaran karena masih aktif atau hidupnya arus listrik

**Sasaran Strategis 2** : Meningkatkan sumber daya aparatur pemadam

Indikator dari Sasaran Strategis “Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemadam” yaitu Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Berada di Level Pemadam 1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana dan personil dalam hal yang terkait meningkatnya pencegahan dan pengendalian / pra kebakaran dari data jumlah kebakaran sebanyak 96 kali pada tahun 2023, 187 Kali pada tahun 2022, 100 kali tahun 2021, 100 kali pada tahun 2020, 188 kali pada tahun 2019 yang kita banding dengan data kebakaran pada tahun 2016 sebanyak 275 bencana kebakaran. Melihat dari perbandingan jumlah kejadian bencana kebakaran kiranya target yang dibuat dapat tercapai. Indikasi ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah kejadian pada tahun 2016 dengan tahun 2017 dan tahun 2018. Pada Tahun 2019 peningkatan jumlah personil yang kita sediakan sudah dapat menjawab sebagian persoalan yang dihadapi.

**Sasaran Strategis 3** : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Indikator dari Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dicapai sesuai dengan target yaitu jumlah nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dimana dengan meningkatnya nilai akuntabilitas tersebut maka meningkatlah kualitas Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada pelayanan perkantoran.



**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**(from TC-30)**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn (n-2) 2023	Thn (n-1) 2024	Thn (n) 2025	Thn(n+1) 2026	Thn(n-2) 2023	Thn(n-1) 2024	Thn(n) 2025	Thn(n+ 1) 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13
1	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	-	100	53%	50%	52%	60%	53%	50 %	52%	60%	Pelayanan pemadaman sudah dilakukan, akan tetapi realisasi capaian masih kurang 6% dari target dikarenakan kondisi pada posko ke lokasi masih jauh
2	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran) oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah	-	100	46%	53%	60%	67%	40%	53%	60%	67%	Pelayanan pemadaman sudah dilakukan, akan tetapi realisasi capaian masih kurang 6% dari target dikarenakan kondisi pada posko ke lokasi



												masih jauh
3	Penanganan kebakaran waktu tanggap	-	100	15	15	15	15	15	15	15	15	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai
4	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/kota	-	100	59	60	60	65	59	60	60	65	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai
5	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana dan prasarana	-	100	8	8	8	8	8	8	8	8	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai
6	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	-	-	132	132	132	132	132	132	132	132	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai
7	Pos damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	-	100	8	8	8	8	8	8	8	8	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai



8	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud dalam permendagri 16 tahun 2009 tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran	-	-	113	113	113	113	56	113	113	113	Realisasi jauh dari target karena untuk mendapatkan kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud dalam permendagri 16 tahun 2009 tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran harus diklat yang diberikan oleh kemendagri
9	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	-	-	113	113	113	113	56	113	113	113	Kurangnya sarana dan prasarana pada dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan
10	Jumlah kegiatan investigasi kejadian kebakaran yang terlaksana	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Pada dasarnya kegiatan investigasi kejadian kebakaran sudah dilakukannya investigasi
11	Jumlah kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaraan	-	-	50	50	50	50	50	50	50	70	Target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai



14	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	-	-	113	113	113	113	56	113	113	113	Kapasitas yang memiliki sertifikat pemadam 1 masih 56 orang
15	Persentase pencegahan, penyelamatan, pemadaman dan evakuasi korban kebakaran	100	53%	50%	52%	60%	53%	50 %	52%	60%	100	pencegahan, penyelamatan, pemadaman dan evakuasi korban kebakaran sudah dilakukan ke seluruh masyarakat
16	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	-	-	150	155	200	250	411	155	200	250	Seluruh target indikator pencapaian kinerja PD dapat terealisasi tercapai



Tabel 2.2.a

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	71.32	72.96	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87.98	87,98	100	
		Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota	100	100	100	
2	Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	50	50	100	
3	Meningkatnya layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non	53	53	100	



		kebakaran)				
Rata-Rata					97,16	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan oleh dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan sudah berkaitan erat dengan IKU kepala perangkat daerah, karena persentase pelayanan terhadap pelayanan kebakaran dan non kebakaran sudah baik dan pelayanan yang diberikan sudah maksimal terutama kepada masyarakat sesuai dengan Keluaran indikator yang telah terealisasi.



### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Ketentraman Umum dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.

Adapun ISU yang muncul pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, adalah sebagai berikut :

Pada anggaran yang ada di dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas langsung membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah tidak mendukung karena keterkaitan pada anggaran operasional yang ada serta aparatur yang kurangnya menjadi hambatan dalam penyelenggaraan urusan dan kegiatan yang akan dilakukan.

Peralatan dan perlengkapan yang kurang memadai juga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan yang turun langsung dengan masyarakat dan aparatur yang ada masih banyak belum memiliki sertifikat juga menjadi pendukung dalam melaksanakan tugas yang ada pada program, kegiatan, serta Sub kegiatan yang ada, Adapun tugas dari pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :



- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Sub Urusan Kebakaran;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Sub Urusan Kebakaran;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- g. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2.3.1 Sumber Daya

- **Sumber Daya Aparatur**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan tenaga yang profesional yang mampu bekerja secara optimal dengan keahlian yang dimilikinya, memiliki kreativitas yang tinggi sehingga mampu berinovasi, proaktif dalam melakukan perubahan yang mampu meningkatkan kapabilitas organisasi, responsivitas yang tinggi karena tuntutan untuk mampu menterjemahkan berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat dan para pemangku kepentingan, dan berwawasan entrepreneurial karena tuntutan untuk membangun sinergi, kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan struktur jabatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris dan 3 Kepala Bidang, 2 kepala Sub Bagian dan 9 Kepala Seksi dan 1 dalam



keadaan kosong, 15 orang ASN 40 orang PPK dan 94 pasukan dengan total 165 orang di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini.

Adapun kualifikasi pangkat dan latar belakang pendidikan seperti tabel berikut :

Tabel.  
2.3.1

Golongan PNS	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	Total
Gol IV	1	5				6
Gol III	2	10	1	3		14
Gol II				10		10
Gol I					1	1
PPPK				40		40
Pasukan						94
Jumlah						165

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa secara kuantitas personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masih sangat kekurangan atau sangat minim. Secara kualitas, meskipun dipengaruhi oleh jumlah yang kurang namun dikarenakan penerapan budaya *learning by doing* dan saling berbagi informasi dengan membangun komunikasi dan transfer pengetahuan, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya dapat berjalan baik.

### 2.3.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota sejak berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, belum memiliki bangunan sendiri. Pada tahun 2017 dimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan PD baru lahir telah diberikan lokasi kantor di Eks Kantor



DPPKD (sekarang Badan Keuangan), yang beralamat di Eks Kantor Bupati Lima Puluh Kota yang terletak di Kota Payakumbuh.

### **2.3.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran**

Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat diketahui diantaranya dari Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun sebelumnya (Tahun 2023); isu strategis dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan periode sebelumnya (yang masih berpedoman kepada Resntra BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota), dan perkiraan tingkat pencapaian target renstra sampai dengan akhir tahun berjalan; Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian / realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan Renstra.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu tahun terakhir telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan Bencana lainnya melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah, seperti : Dinsos, Dinkes, BMKG, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, pihak swasta, dan unsur masyarakat sampai ke tingkat jorong.

Pelayanan umum yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam satu tahun terakhir terdiri dari :

1. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
2. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan wilayah terdekat atau tetangga yang membutuhkan di luar Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan simulasi kepada masyarakat, pemerintah dan swasta serta sekolah-sekolah.



4. Melakukan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dengan instansi terkait, seperti Dinsos, Dinkes, BMKG, TDMRC, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM serta pihak swasta.
5. Pelayanan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa pengelolaan program dan kegiatan Dinas, pengelolaan keuangan Dinas, pengelolaan kepegawaian Dinas dan ketatausahaan umum lainnya.

Beberapa indikator dan juga termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang dapat dilihat sebagai tolok ukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
- Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
- Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi
- Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran pada WMK

Dari indikator-indikator tersebut diatas dapat dilihat kondisi existing Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota secara rinci sebagai berikut :

#### **Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran**

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.



WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain : pemukiman, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan bencana lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota belumlah sesuai dengan harapan. Sampai data Tahun 2024 ini, jumlah Posko Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 8 (Delapan), 1 Posko Utama dan 7 Posko Pembantu.

Disisi lain 1 posko juga melayani beberapa kecamatan tergantung pada lokasi terjadinya bencana kebakaran dan bencana lainnya. Selain itu pelayanan terhadap penanggulangan bencana kebakaran tidak hanya pada wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi juga pada daerah-daerah tetangga yang membutuhkan, dikarenakan penanggulangan terhadap bencana kebakaran tidak mengenal batas wilayah.

Dari jumlah posko dibandingkan dengan luas wilayah serta mengacu kepada Wilayah Manajemen Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentulah tidak berbanding lurus dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal terhadap ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat. Hal lain yang menjadi catatan penting yang tidak boleh kita abaikan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak hanya menanggulangi bencana kebakaran tapi juga harus menjalankan Panca Darma Pemadam.

Cakupan Bencana Kebakaran dan bencana lainnya merupakan daerah-daerah yang terproteksi dari bencana kebakaran dan bencana lainnya yang ditandai dengan telah terbangun/pemanfaatan pos-pos pembantu, di samping Pos Induk di Eks Kantor Bupati Lima Puluh Kota di Payakumbuh, yaitu:

1. Pos Pembantu di Kecamatan Suliki
2. Pos Pembantu di Kecamatan Pangkalan
3. Pos Pembantu di Kecamatan Kapur IX



4. Pos Pembantu di Kecamatan Lareh Sago Halaban
5. Pos Pembantu Di Kecamatan Harau
6. Pos Pembantu Di Kecamatan Mungka
7. Pos Pembantu di Kecamatan Akabiluru
8. Pos Pembantu di Posko Utama (INDUK)

**Tingkat Waktu Tanggap** (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan risiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industry yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Pemetaan masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pengurangan Resiko Kebakaran	1. Upaya mitigasi sebagai salah satu hal yang penting melalui perencanaan penganggaran belum menjadi perhatian.	1. Belum tersedianya dokumen teknis Kebakaran(kajian risiko Kebakaran, rencana penanggulangan kebakaran dan rencana kontijensi) 1. Belum tersedianya regulasi/kebijakan tentang penanggulangan kebakaran di daerah dalam bentuk perda dan perkada
	2. Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat untuk mitigasi kebakaran	1. Masih kurangnya sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko kebakaran 2. Kurangantisipasi dan masih rendah tingkat sadar Bahaya kebakaran 2. Seruan dan himbauan peringatan bahaya kebakaran kurang direspon 3. Belum optimalnya kelompok Balakar



Berdasarkan pemetaan masalah pada tabel diatas, terlihat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam pengurangan resiko kebakaran dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan kebakaran. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Damkar Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan beberapa kegiatan dan rencana pendanaan penanggulangan kebakaran dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah tersebut bahwa target yang harus dicapai dalam penerapan SPM adalah 100%, artinya kita dituntut untuk memberikan seluruh hak dasar yang harus diterima oleh warga negara yang berada di daerah rawan kebakaran dan bencana lainnya dan warga negara yang terdampak atau menjadi korban.

Permasalahan dan hambatan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

- Upaya mitigasi sebagai salah satu hal yang penting dalam penanggulangan resiko kebakaran dan bencana lainnya perlu didukung dengan perencanaan yang komprehensif dan penganggaran yang memadai.
- Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat untuk mitigasi Kebakaran dan bencana lainnya disebabkan oleh Kurangnya sosialisasi dan simulasi penanggulangan kebakaran serta koordinasi ekonomi dan sosio cultural/kearifan local masyarakat.



- Masih perlunya peningkatan layanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.

Berdasarkan pemetaan masalah ditetapkan 2 hal yang menjadi isu strategis yang menjadi dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

- Optimalisasi perencanaan dan penganggaran dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko kebakaran dan bencana lainnya.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal**

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, Penanggulangan Bencana Kebakaran belum menjadi kebijakan utuh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota karena masih menjadi bagian dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan membandingkan antara program dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan renja kerja. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana Kebakaran yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana Kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pemadam Kebakaran



dan Penyelamatan yang masih baru terbentuk membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun eksternal. Secara internal, masih banyak kebutuhan peralatan kebencanaan kebakaran terutama alat berat dan sebuah gudang representatif untuk menyimpan dan mengelola peralatan tersebut.

Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang siap siaga bencana Kebakaran dan Bencana lainnya melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara eksternal, penguatan kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus menjadi prioritas untuk menunjang fungsi Panca Darma DAMKAR dan dari hasil analisis kebutuhan program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025.

Kebutuhan dana pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 8.386.383.279,- memenuhi standar kebutuhan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2025 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota .

Pada tahun 2025 rencana kerja dari dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan perlu dilaksanakan karena pertimbangan dari masyarakat terhadap pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat terkhususnya pelayanan kebakaran dan non kebakaran serta berhadapan langsung kepada masyarakat, terkhususnya masyarakat kabupaten lima puluh kota, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan lebih jauh dari dinas pemsdam kebakaran dan pihak terkait tentang penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Perbedaan pada perencanaan tahun 2025 dibandingkan pada perencanaan tahun sebelumnya adalah penambahan kegiatan dan sub



kegiatan baru tentang menunjangnya urusan dari dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan serta mengarah pada visi misi dari kepala daerah dan program - program unggulan dari kepala daerah tentang tupoksi dari dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan.



Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD  
(from T.C 31 dalam lampiran permendagri 86 Tahun 2017)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota		DPK	Jumlah pelaksanaan urusan penunjang pemerintah daerah kabupaten	100%	<b>5.663.660.064</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota		DPK	Jumlah pelaksanaan urusan penunjang pemerintah daerah kabupaten	100%	<b>5.736.035.380</b>	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		DPK	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	<b>5.238.874.814</b>	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		DPK	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	<b>5.377.203.417</b>	
		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	DPK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	5.238.874.814		Penyediaan Gaji dan tunjangan Asn	DPK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5.362.453.417	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	DPK	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	DPK	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis dan Realisasi Anggaran	DPK	Jumlah laporan realisasi dan capaian kinerja SKPD	Dokumen	0		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis dan Realisasi Anggaran	DPK	Jumlah laporan realisasi dan capaian kinerja SKPD	Dokumen	0	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		DPK	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	bulan	192.736.250	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		DPK	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	bulan	123.333.143	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	DPK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	53.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	DPK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	17.025.000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPK	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 paket	34.000.000		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPK	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bln	0	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	DPK	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	25.000.000		Penyediaan peralatan rumah tangga	DPK	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	11.595.248	
		Penyediaan bahan logistik kantor	DPK	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	35.736.250		Penyediaan bahan logistik kantor	DPK	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	38.605.500	
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	DPK	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.000.000		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	DPK	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.851.300	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPK	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPK	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	
		Penyediaan bahan/material	DPK	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 bulan	0		Penyediaan bahan/material	DPK	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
		fasilitasi kunjungan tamu	DPK	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.000.000		fasilitasi kunjungan tamu	DPK	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	2.000.000	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48.256.095	
	Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		DPK	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	bulan	<b>4.000.000</b>	Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		DPK	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	bulan	<b>0</b>	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	
		Pengadaan Mebel	DPK	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	0		Pengadaan Mebel	DPK	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	0	
		Pengadaan peralatan mesin lainnya	DPK	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			Pengadaan peralatan mesin lainnya	DPK	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	DPK	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	DPK	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan daerah		DPK	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan daerah	12 bulan	<b>162.002.000</b>	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan daerah		DPK	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan daerah	12 bulan	<b>4.000.000</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan	5.000.000		Penyediaan Jasa Surat	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	4.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
				Menyurat				Menyurat		Surat Menyurat			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPK	Reke Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	53.002.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPK	Reke Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	53.002.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	104.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	22.949.820	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DPK	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	<b>66.047.000</b>	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DPK	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	<b>83.547.000</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPK	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPK	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	<b>0</b>	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	58.047.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	<b>69.547.000</b>	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14.000.000	
		pemeliharaan aset tetap lainnya	DPK	Jumlah Aset Tetap lainnya yang dipelihara	Unit			pemeliharaan aset tetap lainnya	DPK	Jumlah Aset Tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPK	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPK	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		DPK	Persentase layanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran	100%	<b>2.722.723.215</b>	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		DPK	Persentase layanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran	100%	<b>3.302.103.012</b>	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		DPK	Terlaksananya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	2.605.232.771	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		DPK	Terlaksananya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	1.086.017.180	
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahun nya	1 Dokumen	2.000.000		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahun nya	Dokumen	0	
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.038.000.000		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	120 Laporan	240.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	DPK	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pikt dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kkebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	240.090.000		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	DPK	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pikt dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kkebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	0	
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Penangan Kebakaran Yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	62.000.000		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Penangan Kebakaran Yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	DPK	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara berkala (setiap tahun), sah dan legal	1 dokumen	103 142.771		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	DPK	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara berkala (setiap tahun), sah dan legal	dokumen	826.008.180	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	DPK	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	1 unit	100.000.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	DPK	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Lokasi	0	
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	DPK	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	500 org	10.000.000		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	DPK	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	org	0	
		Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)		Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi & informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan real time yang di,iliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	desa/kelurahan	0		Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)		Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi & informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan real time yang di,iliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	desa/kelurahan	0	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
		Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Dokumen	0		Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Dokumen	0	
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Jumlah Keluarga yang mengikuti pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	50.000.000		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Jumlah Keluarga yang mengikuti pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	0	
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			Terlaksananya Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	55.000.000	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			Terlaksananya Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	0	
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	DPK	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan / gedung/ lingkungan di persyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	1 Dokumen	50.000.000		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	DPK	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan / gedung/ lingkungan di persyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	Dokumen	0	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	DPK	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan / Gedung/ lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	1 Dokumen	5.000.000		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	DPK	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan / Gedung/ lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran		DPK	Terlaksananya Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	<b>15.000.000</b>	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran		DPK	Terlaksananya Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	<b>0</b>	
		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	DPK	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran Yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	15.000.000		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	DPK	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran Yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	0	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		DPK	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	<b>47.490.444</b>	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		DPK	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	<b>2.216.085.832</b>	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	DPK	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang	47.490.444		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi	DPK	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang	2.216.085.832	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
								Masyarakat					
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	DPK	Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	Nagari	0		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	DPK	Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	Nagari	0	
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	DPK	Jumlah Dokumen yang memuat jumlah SKKL desa/ Kelurahan yang telah tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	0		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	DPK	Jumlah Dokumen yang memuat jumlah SKKL desa/ Kelurahan yang telah tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	0	
	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		DPK	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	0	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		DPK	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	0	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	12	13
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	DPK	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	0		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	DPK	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	0	
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	DPK	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	Laporan	0		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	DPK	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	Laporan	0	
						<b>8.386.383.279</b>						<b>9,038.138.392</b>	



## **2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.**

Dalam penyusunan renja perangkat PD, salah satu proses yang tidak boleh di abaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD.

Dalam kegiatan Musrembang tahun 2024 untuk penyusunan rencana 2025, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus untuk Pemadam Kebakaran. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan hasil rumusan dan usulan dari tingkat jorong/nagari hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjangiran aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling. Dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang insidental dan harus segera ditangani seperti kejadian kebakaran.



Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Lima Puluh Kota

(From TC. 32)

no	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		<b>NIHIL</b>			



### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, haruslah diselaraskan dan dikaitkan juga dengan kebijakan nasional maupun provinsi berkenaan dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan. Dengan berpedoman kepada Tugas dan Fungsi arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan tersebut dijabarkan melalui RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Prioritas nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 memuat 7 (tujuh) agenda pembangunan, dimana pada Agenda ke-enam Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dimana pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim.

Sejalan dengan ini Kabupaten Lima Puluh kota menempatkan persoalan kebencanaan ini kedalam salah satu misi kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Misi Ke Lima Yaitu Meningkatkan Pembangunan Insfratraktur Secara Terpadu Yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Baik.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan public	▪ Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Peningkatan pengelolaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan dan program penunjang urusan pemerintah
2. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari	▪ Meningkatnya pencegahan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran	▪ Penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya yang ada



bahaya kebakaran dan non kebakaran	▪ Meningkatnya layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran	▪ Melatih tenaga aparaturnya pemadam kebakaran ▪ Merekrut tenaga sukarela pemadam kebakaran
------------------------------------	--	--

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor), dimana penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub Urusan Kebakaran.

### **Indikator Kinerja Sasaran**

1. Penyuluhan dan bimbingan teknis kepada Masyarakat.
2. Presentase jumlah pemeriksaan dan pengawasan bangunan/ gedung dalam hal proteksi kebakaran.
3. Tingkat waktu tanggap ( response time rate ) daerah Layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK.)
4. Terbangunnya pos pemadam kebakaran. Cakupan pelayanan bencana kebakaran.
5. Presentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang berkualifikasi penyelamatan.

### **Program Utama :**

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan bahaya kebakaran.
2. Penanggulangan Kebakaran.
3. Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Tahapan perumusan rencana program/kegiatan merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau



beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan ( wajib dan pilihan).

Adapun program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota setelah melalui Tahapan Verifikasi bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk dioperasionalkan pada tahun 2023 yang terdistribusikan pada 2 program dan 10 kegiatan, dan 39 Sub Kegiatan terdiri dari :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
  - kegiatan administrasi keuangan
  - Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
  - Kegiatan pengadaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah
  - Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
  - Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
  - Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanggulangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
  - Kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran
  - Kegiatan investigasi kejadian kebakaran
  - Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
  - Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan : MUTU PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (SPM).



## 1. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran dan langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industry yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) merupakan daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dimana dengan terbentuknya beberapa pos diharapkan dapat diberikan bantuan untuk penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya dengan sesegera mungkin dapat ditanggulangi dalam waktu yang tidak lama dengan tetap berpedoman kepada Standar Operasional yang telah ada.

## 2. Prosedur Operasional Penanganan Kebakaran Penyelamatan Dan Evakuasi.

Olah data informasi oleh petugas operator: merespon laporan kejadian kebakaran pada buku catatan kejadian darurat **Pastikan Informasi A1** (tidak diragukan lagi) dengan rincian sebagai berikut:

- Nama pelapor,
- No. telepon pelapor,
- Alamat tempat kejadian,
- Jenis yang terbakar,
- Bahan yang terbakar.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan tunjangan Asn		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis dan Realisasi Anggaran		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		
		Penyediaan peralatan rumah tangga		
		Penyediaan bahan logistik kantor		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		
		Penyediaan bahan/material		
		fasilitasi kunjungan tamu		
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		
		Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
				Pengadaan mebel
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				



	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	



		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai pelaksana urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran, tentulah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota tentulah akan menunjang tercapainya visi dan misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Renja Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota ini merupakan bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran APBD Tahun 2024 dan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja PD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran Visi dan Misi Perangkat Daerah akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi serta berkelanjutan, dengan sesama PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PD yang membidangi fungsi lain.

Eskalasi permasalahan kebakaran dan kebencanaan lainnya yang cukup sering terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota maka dari itu diperlukan prioritas dan arah penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Maka tahun 2024 kita coba untuk memfokuskan program sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan
  - a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses operasional kebakaran dan pasca kebakaran serta upaya-upaya penyelamatan baik akibat bencana kebakaran maupun akibat bencana lainnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  - b. Meningkatkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan terkait dengan upaya-upaya pencegahan kebakaran.
  - c. Memberikan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) kepada petugas teknis lapangan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk meningkatkan kemampuan teknis (technical ability) di bidangnya sesuai dengan kualifikasi masing-masing.



- d. Memberikan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) kepada petugas teknis lapangan bidang kebencanaan dan penyelamatan untuk meningkatkan kemampuan teknis (technical ability) di bidangnya sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
  - e. Meningkatkan jumlah armada tempur (brandweer dan unit supply) beserta personel (petugas teknis lapangan) baik secara kualitas dan kuantitas.
2. Meningkatkan ketahanan lingkungan bersama masyarakat
- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
  - b. Optimalisasi implementasi peraturan-peraturan yang terkait dengan kebakaran dan kebencanaan lainnya.
  - c. Membentuk struktur dan keanggotaan relawan BALAKAR di setiap Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
  - d. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada relawan BALAKAR secara rutin dan periodic
  - e. Melakukan kegiatan bakti sosial sesuai dengan Panca Darma Kebakaran seperti melakukan donor darah, kebersihan lingkungan, dan melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pengurangan kebakaran dan non kebakaran
- a. Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kantor Dinas Pemadam (Markas Damkar) di Sarilamak sebagai ibu kota Kabupaten pada tahun 2024.
  - b. Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK), dengan penambahan posko pembantu Damkar di Kecamatan Suliki.



**Tabel 4.1**

**Rencana Target Kinerja dan IKU Perangkat Daerah**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (tahun 2020)	Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (tahun 2026)	Ket.
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	B	BB	BB	A	IKU PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	87,98	89,97	95,96	IKU PD
3	Indeks reformasi birokrasi	42,50 (C)	53,33 (CC)	58,75 (CC)	75,00 (B)	IKU PD
4	Indeks inovasi daerah	197	700	1.000	1,700	IKU PD
5	Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota	100	100	100	100	IKU PD
6	Indeks layanan Kebakaran dan Non Kebakaran	100	100	100	100	IKU PD
7	Persentase Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	46	50	52	80	IKU PD
8	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (operasi non kebakaran)	46	53	53	81	IKU PD



**Tabel 4.2**  
**Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Indikator tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2021)	Target		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Ket
			Tahun 2023	Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Persentase pencegahan, penyelamatan, pemadaman dan evakuasi korban kebakaran	46%	52%	58%	76%	
2	Persentase pelayanan pencegahan dan penyelamatan evakuasi non kebakaran	46%	53%	60%	81%	
3	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	46%	52%	58%	76%	
4	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	39%	46%	53%	81%	
5	Penanganan kebakaran waktu tanggap (respon time)	15	15	15	15	
6	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi	7	7	8	11	
7	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	113	113	113	313	
8	Jumlah aparatur pemadam yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud permendagri nomor 16 tahun 2009 tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran	56	56	70	113	
9	Jumlah kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	50	50	52	70	
10	Pos damkar yang dilengkapi sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan /desa	7	8	8	11	



11	Jumlah dan jenis sarana prasana pemadam, penyelamatan dan evakuasi	113	113	138	313	
12	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	113	113	138	313	
13	Jumlah kegiatan investigasi kejadian kebakaran yang terlaksana	90	100	100	100	
14	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	240	240	240	350	
15	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran) oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan di kabupaten/kota	120	120	130	135	

Adapun tujuan dari Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah dapat membantu dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan menunjang Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik dan Meningkatkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakarandan non kebakaran.

Dalam pelaksanaan dan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kedepan dalam membantu Program Kepala Daerah pada 13 Kecamatan dinas damkar hendaknya harus memiliki Posko pembantu pada tiap tiap kecamatan agar masyarakat dapat berhubungan langsung dengan pemerintah daerah. Pada kondisi tahun 2022 dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan hanya memiliki 7 Posko dan Jumlah aparatur pemadam kebakaran 132 serta relawan kebakaran dibawah binaan dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 240 orang, Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten 120 Kali.

Pada tahun 2025 Dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh



Kota membutuhkan dana sebesar Rp.8.386.383.279,- ( Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang terbagi dalam 2 (Dua) program sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

No	Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana	Ket
<b>1</b>	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>5.663.660.064</b>	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.238.874.814	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.736.250	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.002.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.047.000	
<b>2</b>	<b>Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</b>	<b>2.722.723.215</b>	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.605.232.771	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	55.000.000	
	Investigasi Kejadian Kebakaran	15.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	47.490.444	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	0	
	<b>Total</b>	<b>Rp. 8.386.383.279</b>	

Harapan lain juga kita berharap dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat juga diperoleh melalui pihak ketiga atau donatur.

Sehingga kita berharap kiranya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat melalui hadirnya Pemerintah ditengah-tengah masyarakat.



Sedangkan rencana program, kegiatan dan pagu indikatif badan penanggulangan kebakaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2025 serta perkiraan maju tahun anggaran 2026 adalah sebagaimana dalam tabel berikut :



Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Lima Puluh Kota

Perangkat Daerah: Dinas Pemadam Kebakaran

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				5.663.660.064	APBD			5.782.874.814
1 05 01 2,02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		DPK		5.238.874.814	APBD			5.294.874.814
1 05 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPK	69 orang/bulan	5.238.874.814	APBD		69 orang/bulan	5.238.874.814
1 05 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPK	1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	25.000.000
1 05 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPK	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	31.000.000
1 05 01 2,06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		DPK		192.736.250	APBD			241.000.000
1 05 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPK	40 Paket	53.000.000	APBD		40 Paket	53.000.000



1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPK	40 Paket	34.000.000	APBD		40 Paket	35.000.000
1	05	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPK	12 Paket	25.000.000	APBD		12 Paket	30.000.000
1	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPK	40 Paket	35.736.250	APBD		40 Paket	37.000.000
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	DPK	12 Paket	2.000.000	APBD		12 Paket	6.000.000
1	05	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	DPK	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	35.000.000
1	05	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DPK	12 bulan	-	APBD		12 bulan	-
1	05	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 Laporan	3.000.000	APBD		1 Laporan	5.000.000
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPK	1 Laporan	30.000.000	APBD		1 Laporan	40.000.000
1	05	01	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		DPK		4.000.000				10.000.000
1	05	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPK	2 Unit	4.000.000	APBD		2 Unit	10.000.000
1	05	01	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	DPK	12 bulan	-	APBD		12 bulan	-
1	05	01	2,08		Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DPK		162.002.000				147.000.000



1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPK	1 Laporan	5.000.000	APBD		1 Laporan	12.000.000
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPK	1 Laporan	53.002.000	APBD		1 Laporan	60.000.000
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPK	1 Laporan	104.000.000	APBD		1 Laporan	75.000.000
1	05	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.047.000				90.000.000
1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPK	5 Unit	58.047.000	APBD		5 Unit	60.000.000
1	05	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPK	10 Unit	8.000.000	APBD		10 Unit	30.000.000
1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunanlainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPK	12 bulan	-	APBD		12 bulan	-
1	05	04			<b>Proram Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>		DPK		<b>2.722.723.215</b>				<b>5.301.769.000</b>
1	05	04	2,01		Kegiatan Pencegahan, Pengedalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Bahaya Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota		DPK		2.605.232.771				4.357.000.000



1	05	04	2,01	01	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	DPK	1 Dokumen	2.000.000	APBD		1 Dokumen	7.000.000
1	05	04	2,01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPK	1 laporan	2.038.000.000	APBD		1 laporan	2.009.000.000
1	05	04	2,01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	DPK	1 Dokumen	240.090.000	APBD		1 Dokumen	250.000.000
1	05	04	2,01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPK	1 Dokumen	62.000.000	APBD		1 Dokumen	65.000.000
1	05	04	2,01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	DPK	1 Dokumen	103.142.771	APBD		1 Dokumen	950.000.000



1	05	04	2,01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	DPK	500 Orang	10.000.000	APBD	500 Orang	60.000.000
1	05	04	2,01	08	Pengelolaan Sistem dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahunnya), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	DPK	13 Desa/Kelurahan	-	APBD	13 Desa/Kelurahan	-
1	05	04	2,01	017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	DPK	1 Unit	100.000.000	APBD	1 Unit	850.000.000
1	05	04	2,01	018	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	DPK	1 Dokumen	0	APBD	1 Dokumen	0



1	05	04	2,01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga		50 Keluarga	50.000.000			50 Keluarga	166.000.000
1	05	04	2,02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		DPK		55.000.000	APBD			130.975.000
1	05	04	2,02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	DPK	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	68.975.000
1	05	04	2,02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	DPK	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	62.000.000
1	05	04	2,03		Investigasi Kejadian Kebakaran		DPK		15.000.000				75.000.000
1	05	04	2,03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	DPK	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	75.000.000
1	05	04	2,04		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	DPK		47.490.444				337.162.000
1	05	04	2,04	01	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	DPK	500 Orang	47.490.444	APBD		500 Orang	135.210.000



1	05	04	2,04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	DPK	13 Desa/Kelurahan	-			13 Desa/Kelurahan	125.932.000
1	05	04	2,04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase tersedianya sarana dan prasarana dalam pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran	DPK	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	76.020.000
1	05	04	2,05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		DPK		-				401.632.000
1	05	04	2,05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	DPK	1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	75.000.000
1	05	04	2,05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian Dan Pertolongan Terhadap kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	DPK	1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	326.632.000
													<b>8.386.383.279</b>
													<b>11.084.643.814</b>



Pada Rancangan awal renja 2025 ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengusulkan 2 Program 10 Kegiatan 39 sub kegiatan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 5.663.660.064,- dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Rp. 2.722.723.215,- dengan perencanaan awal renja ini akan dapat meminimalisir keperluan kebutuhan yang dibutuhkan pada dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2025.



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 merupakan suatu rangkaian sistem perencanaan, wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menjawab dan mengadopsi berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat. Kaidah Pelaksanaan Renja sebagai suatu perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai peran strategis untuk menjembatani perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Pada rancangan awal RKPD dilakukan melalui proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terdapat perbedaan baik dari sisi anggaran maupun terkait dengan sub kegiatan yang direncanakan. Adanya perbedaan antara rancangan awal yang diusulkan dengan anggaran sebesar Rp. **8.386.383.279,-** kemudian berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan untuk pencapaian target SPM Damkar, target IKU daerah dan Damkar sebagaimana tertuang didalam Renstra Damkar 2021-2026 maka anggaran yang diajukan menjadi sebesar Rp. **8.386.383.279,-**.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 sebagai bahan dan masukan yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik. Demikian Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2025 disusun, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman kepada Kebijakan umum anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Terimakasih

Semoga Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

**KEPALA DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN**

**ALFIAN, S.STP, M.Si.**  
**NIP. 19761220 199511 1 001**